

## **BAB II**

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan berfungsi sebagai landasan utama dalam bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen untuk menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak yang menjalankan bisnis. Hubungan keagenan muncul ketika pemilik perusahaan (prinsipal) memberikan wewenang kepada pihak lain (agen), yaitu manajemen, untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan atas nama mereka melalui kontrak kerja. Dalam perusahaan modern, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sementara manajemen bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola perusahaan. (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan ini rentan terhadap konflik karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Perkembangan teori keagenan turut menyoroti asumsi mendasar mengenai perilaku individu dalam organisasi. Setiap individu cenderung bertindak untuk mengoptimalkan kepentingan diri sendiri (self-interest), memiliki keterbatasan dalam memproses informasi (bounded rationality), dan menunjukkan preferensi risiko yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan agen tidak selalu bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal, terutama dalam situasi ketidakpastian. Perbedaan akses terhadap informasi

menciptakan asimetri informasi, di mana agen memiliki pengetahuan yang lebih baik atas kondisi internal perusahaan dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan ini dapat memicu perilaku oportunistik seperti moral hazard dan adverse selection, karena agen berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri (Khandelwal et al., 2023).

Mekanisme kontrol dalam hubungan prinsipal-agen menjadi penekanan penting teori keagenan sebagai upaya mengurangi konflik tersebut. Konflik kepentingan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang meliputi biaya pemantauan (*monitoring cost*), biaya pengikatan (*bonding cost*), dan kerugian residual (*residual loss*). Biaya pemantauan adalah biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi tindakan agen, biaya pengikatan adalah biaya yang dikeluarkan agen untuk meyakinkan prinsipal atas kepatuhannya, sedangkan kerugian residual merupakan kerugian yang timbul akibat keterbatasan mekanisme kontrol. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, insentif berbasis kinerja, dan transparansi informasi merupakan langkah-langkah penting untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak (Chittineni, 2022).

Penerapan teori keagenan dalam penelitian ini relevan karena mampu menjelaskan perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan kebijakan pajak. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian memungkinkan manajemen bertindak dengan cara yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemegang saham. Situasi ini membuka peluang bagi perilaku oportunistik, salah satunya adalah

*tax avoidance*, yaitu upaya legal untuk meminimalkan beban pajak. Meskipun dapat meningkatkan laba setelah pajak, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila dilakukan secara tidak proporsional (Eky Pambudi et al., 2025).

Teori keagenan tidak hanya digunakan sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai dasar analitis untuk menurunkan hubungan antarvariabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Uraian berikut menjelaskan bagaimana mekanisme keagenan pada masing-masing variabel mendasari arah hipotesis yang dirumuskan.

Profitabilitas dan konflik kepentingan. Manajemen sebagai agen dievaluasi kinerjanya berdasarkan kemampuannya menghasilkan laba, sehingga muncul dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas sebagai sinyal keberhasilan kepada pemegang saham. Di sisi lain, peningkatan laba secara langsung meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Kondisi ini mendorong manajemen memanfaatkan asimetri informasi yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif guna memaksimalkan laba setelah pajak, sebagai bentuk perilaku memaksimalkan utilitas agen (Paraswati & Purwaningsih, 2024).

Ukuran perusahaan sebagai sumber peluang dan kontrol. Perusahaan besar memiliki sumber daya, kompleksitas transaksi, dan kapasitas kelembagaan yang lebih besar untuk merancang strategi perencanaan pajak dibandingkan

perusahaan kecil, sehingga kompleksitas ini turut memperbesar potensi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Namun demikian, perusahaan besar juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator, investor, dan publik, yang berfungsi menekan ruang gerak oportunistik manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan keagenan, peluang dan kontrol pada perusahaan besar harus dipahami secara berimbang (Sulistiyanto & Tjaraka, 2024).

Struktur modal sebagai mekanisme disiplin sekaligus insentif pajak. Utang dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mendisiplinkan manajemen melalui kewajiban pembayaran tetap, namun di sisi lain beban bunga atas utang bersifat dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Kondisi ini memberikan insentif bagi manajemen untuk memanfaatkan struktur pendanaan berbasis utang sebagai salah satu strategi penghindaran pajak, yang mencerminkan potensi konflik kepentingan dalam hubungan keagenan (Fajrian Putra et al., 2025).

Komisaris independen sebagai mekanisme monitoring. Keberadaan dewan komisaris independen merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dan berperan penting dalam mengawasi manajemen. Sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap manajemen, komisaris independen diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi dan mengekang perilaku oportunistik, termasuk praktik *tax avoidance* yang timbul dari pemanfaatan profitabilitas, ukuran perusahaan, maupun struktur modal.

Dengan pengawasan yang efektif, keputusan manajemen menjadi lebih transparan dan akuntabel (Anggraeni & Badjuri, 2025).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa teori keagenan memberikan landasan yang kokoh untuk memahami hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan, khususnya terkait konflik kepentingan dan asimetri informasi. Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal merepresentasikan sisi peluang (*opportunity*) bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen merepresentasikan sisi kontrol (*monitoring*) yang diharapkan mampu menyeimbangkan peluang tersebut. Dengan demikian, teori keagenan tidak hanya berfungsi sebagai dasar konseptual, tetapi juga sebagai kerangka analitis yang relevan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

### **2.1.2 Tax Avoidance**

*Tax avoidance* yaitu strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak tetap berada dalam batas peraturan pajak yang berlaku. Praktik ini dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan tanpa secara eksplisit melanggar hukum, sehingga membedakannya dari penggelapan pajak yang ilegal. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan berbagai taktik, seperti memilih metode akuntansi, mengelola transaksi antar perusahaan, dan memanfaatkan insentif pajak pemerintah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Hossain et al., 2024). Oleh

karena itu, *tax avoidance* bukan hanya masalah kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga strategi manajemen untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan.

Dari perspektif teori keagenan, *tax avoidance* mencerminkan potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajemen sebagai agen, termotivasi untuk meningkatkan laba setelah pajak, karena kinerja laba sering digunakan sebagai ukuran untuk evaluasi kinerja, bonus, dan reputasi profesional. Akibatnya, manajemen cenderung menggunakan berbagai metode untuk mengurangi beban pajak. Namun, tindakan ini tidak selalu selaras dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham, terutama ketika *tax avoidance* dilakukan secara agresif dan menimbulkan risiko terhadap reputasi perusahaan atau kepatuhan terhadap peraturan. Lebih lanjut, asimetri informasi mempersulit prinsipal untuk memantau langsung kebijakan pajak manajemen, sehingga memfasilitasi perilaku oportunistik (Hossain et al., 2024).

Secara operasional, penghindaran pajak umumnya diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) , yaitu rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak. ETR digunakan karena mencerminkan tingkat pajak efektif yang sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan. ETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak sebagai proporsi yang lebih kecil dari labanya, yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Indikator ini dipilih karena bersifat kuantitatif, mudah diperoleh dari laporan keuangan, dan mampu secara langsung menggambarkan

efisiensi pajak. Dengan demikian, ETR berfungsi sebagai proksi yang relevan untuk mengukur perilaku *tax avoidance* suatu perusahaan (Rianti et al., 2023). Berdasarkan uraian di atas, pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan sumber dayanya, termasuk aset dan modal untuk operasional. Rasio profitabilitas mencerminkan efektivitas dan efisiensi manajemen dalam menjalankan perusahaan, sekaligus berfungsi sebagai indikator utama bagi investor dan pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja (Hossain et al., 2024). Perusahaan yang sangat menguntungkan biasanya dipandang memiliki kinerja yang unggul dan prospek masa depan yang cerah.

Dari perspektif teori keagenan, profitabilitas terkait erat dengan perilaku manajemen sebagai agen. Manajemen memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja yang sangat baik melalui peningkatan keuntungan, karena hal ini secara langsung memengaruhi kompensasi, bonus, dan evaluasi kinerja mereka. Situasi ini memotivasi manajemen untuk membuat keputusan strategis termasuk kebijakan pajak untuk mempertahankan tingkat keuntungan. Semakin tinggi keuntungan, semakin besar beban pajak, sehingga mendorong *tax avoidance* untuk mempertahankan pendapatan

bersih setelah pajak. Dengan demikian, profitabilitas adalah salah satu pendorong utama praktik *tax avoidance* di perusahaan (Hossain et al., 2024).

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return on Assets* (ROA), rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari total asetnya. ROA dipilih karena mencerminkan efisiensi penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan laba, sehingga lebih komprehensif daripada rasio seperti *Return on Equity* (ROE). Selain itu, ROA memberikan gambaran kinerja operasional yang lebih stabil karena kurang dipengaruhi oleh struktur modal. Semakin tinggi ROA, semakin kuat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang pada akhirnya dapat mendorong *tax avoidance* sebagai strategi manajemen laba (Hossain et al., 2024). Berdasarkan uraian di atas, pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang mewakili skala perusahaan dari berbagai perspektif, seperti total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar. Ukuran ini mencerminkan tingkat kompleksitas operasional serta kapasitas untuk mengakses sumber daya. Perusahaan besar biasanya memiliki operasi yang lebih kompleks yang didukung oleh dukungan sumber daya yang lebih kuat, sehingga menikmati fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan pajak (Rianti et al., 2023).

Dari perspektif teori keagenan, ukuran perusahaan berkaitan dengan intensitas pengawasan manajemen. Perusahaan besar biasanya menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator, investor, dan publik, yang dapat membatasi perilaku oportunistik oleh manajemen. Namun, kompleksitas operasional yang lebih besar juga meningkatkan asimetri informasi antara prinsipal dan agen, sehingga menciptakan peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk melalui penghindaran pajak .

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan logaritma natural dari total aset ( $\ln$  Total Assets). Penggunaan logaritma dimaksudkan untuk menormalkan data dan meminimalkan perbedaan skala antar perusahaan, sehingga memastikan analisis yang lebih tepat dan tidak bias. Indikator ini banyak digunakan dalam penelitian karena memberikan ukuran perusahaan yang stabil dan mudah diinterpretasikan. Akibatnya, ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel kunci yang memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

### 2.1.5 Struktur Modal

Struktur modal mengacu pada komposisi sumber pendanaan perusahaan, yang terdiri dari utang dan ekuitas. *Leverage* mengukur sejauh mana utang digunakan untuk membiayai operasi. *Leverage* yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang kuat pada pembiayaan eksternal,

sekaligus mencerminkan risiko keuangan yang lebih besar bagi perusahaan. Dalam teori keagenan, utang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku manajemen. Kewajiban untuk membayar bunga dan pokok utang memaksa manajemen untuk lebih disiplin dalam manajemen dan efisiensi operasionalnya. Namun, biaya bunga atas utang juga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga menghasilkan penghematan pajak. Situasi ini memotivasi manajemen untuk meningkatkan utang sebagai strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, keputusan struktur modal bukan hanya masalah pembiayaan tetapi juga mencerminkan konflik kepentingan dalam hubungan keagenan (Fajrian Putra et al., 2025).

Rasio Debt to Equity Ratio diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas, yang membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitasnya. DER digunakan karena secara jelas mencerminkan struktur modal dan tingkat risiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi DER, semakin besar peluang bagi perusahaan untuk menggunakan beban bunga sebagai pengurangan pajak, yang pada gilirannya mendorong *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, struktur permodalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt of Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

#### **2.1.6 Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan direksi yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan, atau hubungan keluarga dengan

manajemen atau pemegang saham pengendali. Kehadiran komisaris independen merupakan komponen penting dari tata kelola perusahaan yang baik, khususnya untuk memperkuat pengawasan manajemen yang efektif.

Dari perspektif teori keagenan, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meminimalkan konflik kepentingan prinsipal-agen. Kehadiran mereka diharapkan dapat membuat pengawasan kebijakan dan keputusan manajemen lebih objektif dan independen, sehingga membatasi perilaku oportunistik seperti *tax avoidance* yang berlebihan. Selain itu, komisaris independen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang mengurangi asimetri informasi antar pihak (Anggraeni & Badjuri, 2025).

Dalam penelitian ini, kehadiran komisaris independen diukur dengan jumlah komisioner independen dibagi dengan jumlah total anggota dewan, berdasarkan kepatuhan terhadap persyaratan proporsi minimum. Pengukuran tersebut diberi nilai 1 jika proporsi komisaris independen mencapai atau melebihi 30% dari total anggota dewan, dan nilai 0 jika di bawah 30%.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menyiratkan bahwa semakin efektif pengawasan mereka, semakin sedikit *tax avoidance* yang terjadi. Di sisi lain,

*leverage*, intensitas modal, dan kepemilikan institusional tidak memengaruhi *tax avoidance*, menunjukkan bahwa faktor pengawasan lebih berpengaruh daripada faktor keuangan dan kepemilikan. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan untuk memperkuat peran komisioner independen, meskipun penelitian selanjutnya harus memperluas cakupan sampel dan variabel.

Sebuah studi oleh (Anna Mei Rani et al., 2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memengaruhi *tax avoidance*, sementara *leverage* memiliki pengaruh negatif dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki dampak signifikan terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, komisaris independen berhasil memoderasi pengaruh profitabilitas dan *leverage*, yang memperkuat peran tata kelola perusahaan dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*.

Sebuah studi sebelumnya (Andini et al., 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi anggota dewan independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, tidak seperti profitabilitas yang memiliki pengaruh negatif signifikan. Ukuran perusahaan gagal memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional atau anggota dewan independen dan *tax avoidance*. Sebaliknya, ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

Penelitian oleh (Yunita Sari & Wikan Kinasih, 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax*

*avoidance*, artinya semakin tinggi keuntungan perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan *tax avoidance*. Sementara itu, *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa struktur utang dan kepemilikan tidak selalu menentukan perilaku pajak perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya daripada dipengaruhi oleh struktur pembiayaan atau kepemilikannya. Sebuah studi sebelumnya oleh (Hanifah, 2022) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*, sementara komite audit dan likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam fungsi komite audit, serta kondisi likuiditas tertentu, dapat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Selain itu, ukuran perusahaan gagal memoderasi pengaruh direktur independen dan likuiditas tetapi memperkuat hubungan antara komite audit dan *tax avoidance*.

Sebuah penelitian sebelumnya oleh (Aini & Kartika, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yaitu, semakin tinggi keuntungan perusahaan, semakin besar kecenderungannya terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, *leverage*, direktur independen, ukuran perusahaan, dan intensitas modal tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas adalah faktor penentu utama, sementara variabel lain tidak memainkan peran signifikan dalam membentuk praktik *tax avoidance*.

Sebuah studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto, 2022) bahwa *leverage* dan intensitas modal tidak memengaruhi *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa penggunaan utang atau investasi dalam aset tetap bukanlah penentu utama praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, profitabilitas memiliki efek negatif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin kuat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, semakin rendah insentifnya untuk menghindari pajak. Hasil ini memperkuat anggapan bahwa perusahaan dengan efisiensi tinggi dan kinerja keuangan yang solid lebih cenderung mematuhi kewajiban pajaknya.

Sebuah penelitian sebelumnya oleh (Hitijahubessy et al., 2022) mengungkapkan bahwa profitabilitas dan *leverage* memiliki efek negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi keuntungan dan utang perusahaan, semakin kuat insentif untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Sementara itu, ukuran perusahaan memiliki efek positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menyiratkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Hasil ini menggarisbawahi bahwa kinerja keuangan dan ukuran perusahaan merupakan penentu penting *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya (Fransisca Sherly, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yaitu, semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan, semakin besar kecenderungannya untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Sebaliknya, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, kualitas audit, komite audit,

kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas adalah pendorong utama praktik *tax avoidance*, sementara variabel lain tidak memainkan peran yang signifikan.

Sebuah studi sebelumnya oleh (Arimurti et al., 2022) mengungkapkan bahwa *leverage* dan intensitas modal tidak memengaruhi *tax avoidance*, tidak seperti profitabilitas (ROA), yang memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, transparansi gagal memoderasi hubungan antara *leverage* dan intensitas modal dengan *tax avoidance* tetapi berhasil memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hasil ini memperkuat gagasan bahwa profitabilitas dan transparansi memainkan peran penting dalam membentuk praktik *tax avoidance*, lebih penting daripada variabel lain.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rianti et al., 2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi *tax avoidance*, sementara *leverage* dan direktur independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kesulitan keuangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Lebih lanjut, direktur independen berhasil memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan *leverage* dengan *tax avoidance*, tetapi gagal memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan dan kesulitan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage*, kondisi keuangan, dan peran direktur independen merupakan penentu utama praktik *tax avoidance*.

Sebuah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Lintang et al., 2023) mengungkapkan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* tidak memengaruhi *tax avoidance* di perusahaan manufaktur. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan, ekspansi penjualan, atau tingkat utang bukanlah pendorong utama praktik *tax avoidance*. Hasil ini memperkuat anggapan bahwa perusahaan memprioritaskan kepatuhan pajak daripada mengeksploitasi kondisi keuangan mereka untuk *tax avoidance*.

Sebuah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sidauruk et al., 2023) menunjukkan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris tidak memengaruhi *tax avoidance*, tidak seperti *leverage* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi dapat memicu praktik *tax avoidance* melalui optimalisasi beban bunga, sementara faktor-faktor lain bukanlah penentu yang dominan. Hasil ini memperkuat temuan bahwa struktur pembiayaan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap *tax avoidance* daripada kinerja penjualan, profitabilitas, atau mekanisme pengawasan.

Rincian temuan hasil penelitian mengenai *tax avoidance* dapat dilihat pada Tabel 2.1.

### **Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Cahyaningtias et al., 2025)	Menganalisis pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 160 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis regresi data panel disertai uji asumsi klasik dan uji hipotesis.	Struktur modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
(Nurhidayat & Sulastri, 2025)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan Komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 104 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis regresi linier berganda dengan SPSS 26.	Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Laurens Vanessa Danarta et al., 2025)	Menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 105 observasi menggunakan purposive sampling; analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi	Karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	periode 2021-2023.	linier berganda dengan SPSS 25.	
(Nirmala Wati & Handayani, 2025)	Menganalisis pengaruh profitabilitas (ROE) dan struktur modal (DER) terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; populasi 35 perusahaan dengan 140 observasi menggunakan purposive sampling; analisis regresi data panel dengan EViews 9.	Secara simultan, profitabilitas dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, profitabilitas tidak berpengaruh, sedangkan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
(Natrion et al., 2025)	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023, khususnya struktur modal, komite audit, kepemilikan institusional, dan transfer pricing.	Metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan; Teknik purposive sampling; analisis regresi linear berganda untung menguji	Secara parsial, struktur modal, komite audit, dan transfer pricing tidak berpengaruh laporan keuangan tahunan; Teknik purposive sampling; analisis regresi linear berganda untung menguji hubungan antar variabel

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		hubungan antar variabel	
(Anggraeni & Badjuri, 2025)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> dan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i> dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.	Metode kuantitatif dengan sampel 42 perusahaan; analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA).	<i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh <i>leverage</i> dan memperlemah pengaruh komisaris independen, tetapi keduanya tidak signifikan.

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Fajrian Putra et al., 2025)	Menganalisis pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 70 observasi dari 16 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis menggunakan SPSS (uji asumsi klasik, regresi, uji F, dan koefisien determinasi).	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, namun tidak mampu memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Perwira & Atmini, 2024)	Menganalisis pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 51 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda dengan EViews.	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Karakter eksekutif Mampu Memperlemah pengaruh profitabilitas, namun tidak memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Setiadewi et al., 2024)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , <i>return on assets</i> (ROA), ukuran perusahaan, <i>capital intensity</i> , komite audit, dan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 150 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.	<i>Leverage</i> , <i>capital intensity</i> , komite audit, dan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, ROA dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Lalita & Rahayuningsih, 2024)	Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 83 perusahaan (249 observasi) menggunakan purposive sampling; analisis regresi linier berganda.	Komite audit, <i>leverage</i> , dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Hossain et al., 2024)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan di Bangladesh sebagai negara berkembang.	Metode kuantitatif dengan data panel seimbang dari 62 perusahaan yang terdaftar di Bursa Dhaka dan Chittagong periode 2009-2020; analisis menggunakan FMOLS dan DOLS.	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Selviana, 2023)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur periode 2018-2020.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 55 perusahaan (2018), 100 perusahaan (2019), dan 79 perusahaan (2020); analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

<b>Peneliti</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Sidauruk et al., 2023)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021	Metode kuantitatif dengan data sekunder; teknik purposive sampling dengan 88 sampel; analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Lintang et al., 2023)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.	Metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan; sampel 26 perusahaan (130 observasi) menggunakan purposive sampling; analisis regresi linier berganda.	Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Rianti et al., 2023)	Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan financial distress terhadap <i>tax avoidance</i> dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada	Metode kuantitatif dengan data sekunder; teknik purposive sampling; analisis regresi data panel menggunakan EViews 10.	Ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan, sedangkan <i>financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.		terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen berpengaruh positif serta mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> , namun tidak mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan
(Arimurti et al., 2022)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , <i>return on assets</i> (ROA), dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> dengan transparansi sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 37 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis regresi data panel dengan EViews 10 dan Moderated Regression Analysis (MRA).	Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . ROA berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Capital intensity tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Fransisca Sherly, 2022)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , capital intensity, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, kualitas audit, dan komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; populasi 204 perusahaan dan sampel 62 perusahaan (186 observasi) menggunakan purposive sampling; analisis regresi linier berganda dengan proksi ETR.	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , capital intensity, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Hitijahubessy et al., 2022)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020	Metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan; sampel 64 perusahaan (256 observasi) menggunakan purposive sampling; analisis regresi data panel dengan EViews 10 dan uji t.	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Apriani & Sunarto, 2022)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , capital intensity, dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016–2020.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 75 observasi menggunakan purposive sampling; analisis regresi linier berganda dengan bantuan EViews 9.	<i>Leverage</i> dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Aini & Kartika, 2022)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , komisaris independen, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 395 observasi; analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda menggunakan SPSS 25.	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, <i>leverage</i> , komisaris independen, ukuran perusahaan, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Hanifah, 2022)	Menganalisis pengaruh <i>corporate governance</i> (komisaris independen dan komite audit) serta likuiditas terhadap <i>tax avoidance</i> dengan ukuran perusahaan sebagai variabel	Metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling (88 sampel); analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA).	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit dan likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh komite audit, namun tidak

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	moderasi.		mampu memoderasi pengaruh komisaris independen dan likuiditas terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Yunita Sari & Wikan Kinasih, 2021)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.	Metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan; sampel 40 perusahaan (120 observasi) menggunakan purposive sampling; analisis regresi linier berganda.	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Andini et al., 2021)	Menganalisis pengaruh kepemilikan instusional, proporsi komisaris independen, dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor	Metode kuantitatif dengan data sekunder; sampel 100 observasi dari 20 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis uji t dan Moderated Regression	Kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak memoderasi

Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	industry barang konsumsi di BEI periode 2015-2019	Analysis (MRA).	pengaruh kepemilikan institusional dan komisaris independen, namun mampu memperkuat hubungan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> .
(Anna Mei Rani et al., 2021)	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran Perusahaan, capital intensity, dan sales growth terhadap <i>tax avoidance</i> dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada Perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi di BEI periode 2015-2019	Metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan; sampel 148 dari 37 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis Moderated Regression Analysis (MRA) dengan proksi CETR	<i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen mampu memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, profitabilitas, capital intensity, dan sales growth tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

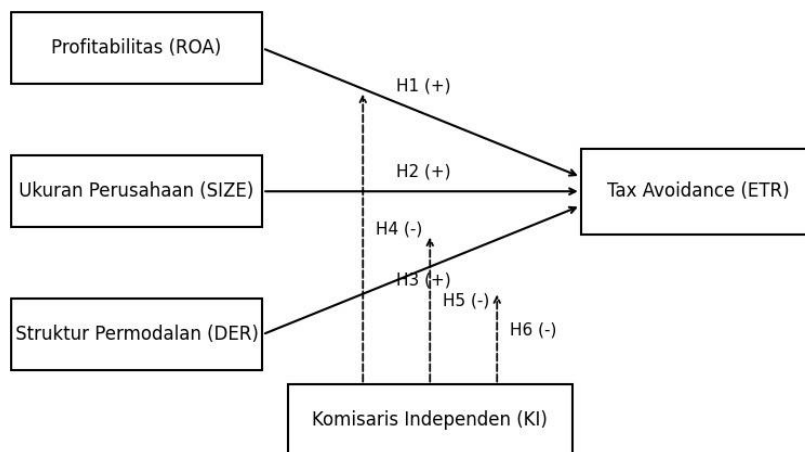
<b>Peneliti</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Dewi & Oktaviani, 2021)	Menganalisis pengaruh <i>leverage</i> , capital intensity, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	Metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan; sampel 75 perusahaan menggunakan purposive sampling; analisis	Komisaris independen berpengaruh negative signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, <i>leverage</i> , capital intensity, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh

Penelitian oleh (Dewi & Oktaviani, 2021) dan (Hanifah, 2022) telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* seperti *leverage*, tata kelola perusahaan, dan ukuran perusahaan, keduanya masih memiliki keterbatasan terkait variabel dalam penelitian ini. (Dewi & Oktaviani, 2021) hanya meneliti efek langsung dari *leverage*, intensitas modal, dan direktur independen tanpa secara bersamaan memasukkan profitabilitas atau ukuran perusahaan, sehingga menghasilkan analisis yang kurang komprehensif. Sementara itu, (Hanifah, 2022) memasukkan tata kelola perusahaan dan likuiditas dengan ukuran perusahaan sebagai moderator tetapi tidak secara langsung mengeksplorasi *leverage*, sehingga modelnya terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum sepenuhnya mengintegrasikan variabel-variabel kunci seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan ke dalam satu model penelitian yang komprehensif untuk menjelaskan *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan oleh karena fokus pada pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* untuk mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya. Dengan memasukkan struktur modal sebagai variabel kunci, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana keputusan pembiayaan memengaruhi praktik *tax avoidance*. Pengujian simultan berbagai variabel juga diharapkan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang bersifat parsial. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris tentang *tax avoidance* dan memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam merancang kebijakan keuangan dan pajak yang optimal.

### 2.3 Kerangka Konseptual

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian**



Dalam perspektif Teori Agensi (Agency Theory), hubungan antar variabel dalam gambar tersebut didasarkan pada adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Manajemen

cenderung melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja keuangan dan bonus mereka, mengingat pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Ketika Profitabilitas perusahaan tinggi, agen memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* guna mempertahankan aliran kas di dalam perusahaan. Begitu pula dengan Ukuran Perusahaan dan Struktur Permodalan, perusahaan yang besar dan memiliki struktur utang yang kompleks memberikan celah serta pembenaran bagi manajemen untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan dalih efisiensi biaya operasional dan perlindungan pajak melalui beban bunga.

Namun, tindakan agresif manajemen ini sering kali menimbulkan biaya agensi dan risiko reputasi bagi pemilik. Di sinilah peran Komisaris Independen sebagai variabel moderasi menjadi krusial. Berdasarkan asumsi teori agensi, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal di dalam dewan yang bertugas menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal. Keberadaan mereka memperkuat fungsi kontrol terhadap kebijakan pajak yang diambil oleh manajemen. Secara logika, kuatnya pengawasan dari komisaris independen akan memperlemah pengaruh positif dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap praktik *tax avoidance*, karena mereka memastikan bahwa manajemen tidak mengambil risiko pajak yang berlebihan yang dapat merugikan pemegang saham dalam jangka panjang.

## 2.1 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah ukuran penting dari kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dari asetnya. Pertanyaan penting yang perlu diteliti adalah apakah tingkat profitabilitas mendorong manajemen untuk lebih aktif terlibat dalam *tax avoidance*. Secara logis, perusahaan dengan keuntungan tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga manajemen mencari cara legal untuk mengurangi beban pajaknya kepada pemerintah. Semakin tinggi keuntungan, semakin kuat insentif bagi manajemen untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Hal ini juga karena perusahaan yang menguntungkan biasanya memiliki lebih banyak dana untuk membayar konsultan pajak ahli dan membangun struktur bisnis yang memungkinkan pengurangan pajak yang sah dan terorganisir.

Menurut Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976) hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen). Manajer ingin menunjukkan laba bersih maksimum kepada pemegang saham, salah satu caranya adalah dengan mengurangi pajak melalui cara-cara legal. Ketika profitabilitas tinggi, pajak yang terutang juga meningkat, sehingga manajer yang sadar biaya menjadi lebih bersemangat untuk merancang strategi pajak agresif untuk mempertahankan laba bersih yang kuat. Asimetri informasi

antara manajer dan pemegang saham memungkinkan manajer untuk mengeksploitasi aturan pajak yang kompleks tanpa pengungkapan penuh, menjadikan *tax avoidance* sebagai praktik oportunistik yang sulit dipantau. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa keuntungan yang tinggi memperluas kesenjangan informasi, yang dieksploitasi oleh manajer untuk menerapkan strategi pajak yang menguntungkan perusahaan tetapi kurang transparan terhadap semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori ini menjelaskan mengapa profitabilitas yang tinggi sebenarnya mendorong manajer untuk lebih aktif terlibat dalam penghindaran pajak

Banyak penelitian empiris mendukung argumen ini secara konsisten. (Aini & Kartika, 2022) /pmenemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan ber laba tinggi mempunyai dana lebih besar untuk strategi pajak canggih dan terstruktur. (Yunita Sari & Wikan Kinasih, 2021) memperkuatnya, bahwa semakin efisien pengelolaan aset untuk laba, semakin kuat dorongan manajemen yang kurangi pajak. (Perwira & Atmini, 2024) juga menyatakan pengaruh positif, tapi bisa dilemahkan oleh eksekutif yang patuh pada aturan malah menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang baik, profitabilitas tinggi tingkat agresivitas pajak. (Fajrian Putra et al., 2025) mengonfirmasi pengaruh positif, yang memperkuat ukuran perusahaan sebagai moderasi, sehingga laba tinggi plus skala besar menciptakan kondisi ideal untuk *tax avoidance*. (Hossain et al., 2024) membuktikan dari berbagai negara bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan di negara berkembang, pola ini universal tak

terbatas industri atau lokasi. Jadi, temuan-temuan ini menunjukkan tingginya tingkat profitabilitas kecenderungan penghindaran pajak. Berdasarkan logika, teori, dan bukti empiris konsistensi, hipotesis pertama yang dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance***

**2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik kunci yang menunjukkan skala operasi, kompleksitas bisnis, dan kekuatan sumber daya perusahaan. Pertanyaan penelitian penting adalah apakah perusahaan besar lebih cenderung terlibat dalam *tax avoidance*. Secara logis, perusahaan besar memiliki lebih banyak staf pajak ahli, dana yang lebih besar untuk konsultan profesional, dan struktur bisnis yang kompleks yang memungkinkan eksploitasi celah hukum dalam peraturan pajak. Diversifikasi bisnis dan transaksi antar unit, yang umum terjadi di perusahaan besar, juga membuka peluang luas bagi manajemen untuk merancang strategi pajak yang canggih, seperti penetapan harga transfer, restrukturisasi bisnis, dan optimalisasi insentif pajak sesuai dengan peraturan.

Menurut Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* terletak pada masalah keagenan yang menjadi semakin kompleks seiring dengan perluasan skala operasi. Perusahaan besar memiliki basis pemegang saham yang tersebar, yang menyebabkan asimetri informasi yang lebih besar antara manajer (agen) dan

pemegang saham (prinsipal), sehingga memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan secara pajak tanpa pengawasan langsung yang ketat. Struktur organisasi yang panjang dan kompleks juga mempersulit pemegang saham untuk memantau keputusan pajak di setiap tingkatan manajemen, membuka peluang yang lebih luas untuk perilaku oportunistik dalam perencanaan pajak. Biaya keagenan yang tinggi mendorong manajer untuk mencari efisiensi operasional termasuk penghematan pajak skala besar untuk menunjukkan kinerja optimal kepada pemegang saham sekaligus mempertahankan posisi dan reputasi mereka.

Dengan demikian, teori ini secara logis menjelaskan mengapa perusahaan besar lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak daripada perusahaan kecil. Banyak studi empiris secara konsisten mendukung argumen ini. (Hitijahubessy et al., 2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena struktur bisnis perusahaan besar lebih kompleks dan memungkinkan adanya celah hukum untuk mengurangi pajak. (Anna Mei Rani et al., 2021) sepakat bahwa perusahaan besar memiliki tim pajak internal yang ahli dan dana yang lebih besar untuk konsultan profesional yang merancang strategi penghindaran pajak yang efektif. (Hossain et al., 2024) menegaskan bahwa di negara berkembang, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan, menunjukkan bahwa sumber daya yang besar digunakan untuk perencanaan pajak yang agresif. (Fajrian Putra et al., 2025) menambahkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap

penghindaran pajak tidak hanya melalui pengaruh langsung tetapi juga dengan memperkuat dampak variabel keuangan lainnya. Namun, (Selviana, 2023) (dan (Setiadewi et al., 2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan, karena faktor-faktor seperti industri, pengawasan regulasi, atau tata kelola internal dapat memengaruhi hasilnya. Secara keseluruhan, mayoritas bukti empiris mendukung hubungan positif. Berdasarkan logika, teori, dan temuan empiris, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **2.4.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance***

Struktur modal mencerminkan perpaduan ekuitas (saham) dan utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasinya. Pertanyaan penelitian yang relevan adalah apakah perusahaan dengan proporsi utang yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam penghindaran pajak. Secara logis, bunga atas utang dalam sistem pajak Indonesia dapat langsung dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga secara otomatis mengurangi jumlah pajak yang terutang. Hal ini menjadikan utang tidak hanya sebagai sumber pendanaan tetapi juga sebagai alat penghematan pajak yang sah dan terukur; akibatnya, perusahaan yang sengaja meningkatkan rasio utangnya akan menuai penghematan pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih banyak bergantung pada ekuitas.

Dalam Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak dijelaskan oleh insentif manajer untuk

mengelola pembiayaan secara strategis. Sebagai agen, manajer berupaya menunjukkan efisiensi keuangan kepada pemegang saham (prinsipal), salah satu caranya adalah dengan meminimalkan pajak melalui pengurangan bunga atas utang. Keputusan untuk meningkatkan utang bukan hanya tentang mengoptimalkan biaya modal; tetapi juga didorong oleh motif agen untuk memaksimalkan penghematan pajak dan dengan demikian meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Asimetri informasi memungkinkan manajer untuk merancang struktur modal yang mengoptimalkan manfaat pajak bunga tanpa transparansi penuh kepada pemangku kepentingan; kebijakan pembiayaan rasional yang menyembunyikan motif penghindaran pajak tidak selalu eksplisit bagi prinsipal. Dengan demikian, teori ini secara komprehensif menjelaskan bagaimana rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi meningkatkan intensitas penghindaran pajak manajemen.

Sejumlah studi empiris secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara struktur modal dan penghindaran pajak. (Rianti et al., 2023) menemukan bahwa struktur modal yang didominasi utang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, karena proporsi utang yang tinggi menghasilkan beban bunga yang substansial yang mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga secara otomatis menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan. (Sidauruk et al., 2023) memperkuat temuan bahwa struktur modal yang bias utang secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak, perusahaan yang berutang besar memiliki insentif yang kuat untuk memanfaatkan pengurangan pajak bunga sebagai strategi manajemen pajak.

(Anggraeni & Badjuri, 2025) mengkonfirmasi bahwa komposisi utang yang tinggi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sebuah temuan yang diperkuat oleh ukuran perusahaan; perusahaan besar yang berutang besar memanfaatkan pengurangan pajak bunga secara lebih optimal. (Lalita & Rahayuningsih, 2024) mendukung pandangan bahwa struktur modal yang sarat utang dan dikelola secara strategis menurunkan tingkat pajak efektif. (Hossain et al., 2024) menunjukkan bahwa di negara berkembang, struktur modal yang sarat utang secara signifikan dan positif terkait dengan penghindaran pajak fenomena yang meluas dan tidak terbatas pada konteks tertentu. Dengan demikian, rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi meningkatkan kecenderungan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan logika, teori, dan bukti empiris yang konsisten, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

**H3: Struktur Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.**

#### **2.4.4 Peran Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.**

Profitabilitas mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, besarnya hubungan ini dapat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan internal perusahaan. Pertanyaan penelitian yang relevan adalah apakah direktur independen dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Secara logis, direktur independen yang tidak berafiliasi dengan manajemen diharapkan bertindak objektif dalam mengawasi

kebijakan keuangan, termasuk perencanaan pajak yang berpotensi agresif. Ketika profitabilitas tinggi, insentif manajemen untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kuat karena kewajiban pajak meningkat, sehingga mendorong pencarian celah hukum. Pengawasan yang efektif oleh direktur independen sangat penting, karena mereka secara proaktif mengevaluasi kebijakan pajak manajemen, memastikan bahwa strategi tetap wajar, bertanggung jawab, dan selaras dengan kepentingan semua pemangku kepentingan.

Dalam Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), komisaris independen berperan sebagai mekanisme kontrol utama untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Ketika profitabilitas perusahaan tinggi, insentif manajer untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kuat, karena beban pajak yang lebih tinggi mendorong strategi penghematan pajak intensif yang bertujuan untuk menghasilkan laba bersih yang memuaskan bagi pemegang saham. Di sinilah peran direktur independen menjadi sangat penting, karena kurangnya afiliasi mereka dengan manajemen memungkinkan mereka untuk secara objektif mengawasi kebijakan pajak yang dirumuskan oleh agen, sehingga membatasi kemampuan manajemen untuk mengeksploitasi celah pajak secara berlebihan. Pengawasan ketat ini secara efektif mengurangi asimetri informasi yang telah lama memungkinkan agen untuk melakukan penghindaran pajak tanpa sepengetahuan penuh prinsipal, sehingga evaluasi kebijakan pajak menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian,

teori ini menjelaskan bahwa komisioner independen secara efektif melemahkan hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak dengan mempersempit ruang lingkup oportunisme manajerial dalam pengambilan keputusan pajak.

Sejumlah studi secara konsisten menunjukkan peran moderasi komisaris independen antara profitabilitas dan penghindaran pajak (Dewi & Oktaviani, 2021) menemukan efek negatif yang signifikan dari direktur independen terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa kehadiran mereka secara efektif mengekang praktik penghindaran pajak termasuk yang didorong oleh profitabilitas tinggi melalui pengawasan ketat terhadap kebijakan keuangan yang berpotensi berlebihan. (Anna Mei Rani et al., 2021) memperkuat temuan bahwa direktur independen, dalam peran pengawasannya, membatasi penghindaran pajak, tingkat pengawasan yang tepat mendorong manajemen untuk merancang strategi pajak yang bertanggung jawab bahkan ketika keuntungan tinggi. (Andini et al., 2021) menekankan urgensi moderasi ini karena pengawasan internal yang memadai mengendalikan kecenderungan terhadap penghindaran pajak yang dihasilkan dari kinerja keuangan yang unggul dan menyoroti peran kunci dalam menjaga akuntabilitas untuk keputusan manajemen. (Nurhidayat & Sulastri, 2025) menegaskan bahwa pengawasan yang efektif mengendalikan hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak, dengan komisioner independen berfungsi sebagai pengaman utama untuk memastikan keputusan pajak yang bertanggung jawab selaras dengan kepentingan pemangku

kepentingan. Dengan demikian, temuan-temuan ini secara konsisten menunjukkan bahwa komisioner independen memoderasi dan melemahkan hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Berdasarkan argumen ini, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

**H4: Komisaris Independen memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

#### **2.4.5 Peran Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.**

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks, efektivitas pengawasan internal juga menentukan sejauh mana perilaku tersebut dapat dikendalikan. Pertanyaan penelitian yang relevan adalah apakah direktur independen mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Secara logis, perusahaan besar dengan tingkat kompleksitas operasional yang tinggi sebenarnya membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan lebih kompeten dari anggota dewan untuk menyeimbangkan kebebasan manajemen dalam merancang strategi pajak yang semakin canggih. Semakin luas skala operasional, semakin besar tanggung jawab direktur independen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pajak manajemen mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, daripada hanya berfokus pada penghindaran pajak yang berpotensi merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), konflik keagenan di perusahaan besar lebih kompleks karena struktur organisasi yang hierarkis dan terdesentralisasi menciptakan kesenjangan informasi yang lebih besar antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Kompleksitas ini menciptakan peluang yang lebih luas bagi agen untuk mengeksploitasi sumber daya perusahaan guna merancang strategi penghindaran pajak yang lebih canggih tanpa pengawasan langsung yang memadai dari prinsipal. Komisioner independen muncul sebagai solusi struktural untuk masalah keagenan ini, karena komisioner yang kompeten dan ditunjuk secara proporsional dapat menyeimbangkan kompleksitas operasional perusahaan besar melalui pengawasan intensif dan komprehensif terhadap setiap kebijakan pajak yang dirumuskan oleh manajemen. Komisioner independen yang efektif juga secara langsung mengurangi asimetri informasi yang telah lama menjadi dasar bagi manajer perusahaan besar untuk merancang skema penghindaran pajak yang sulit dipantau, sehingga memastikan bahwa keputusan pajak berdasarkan skala ekonomi dapat diteliti lebih kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, teori ini secara logis menjelaskan bahwa komisioner independen bertindak sebagai moderator yang melemahkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak dengan memperkuat pengawasan dan mengurangi asimetri informasi dalam dinamika keagenan.

Sejumlah penelitian secara konsisten membuktikan peran moderator komisaris independen antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* (Rianti et

al., 2023) secara eksplisit menemukan bahwa direktur independen memoderasi efek ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk strategi penghindaran pajak, pengawasan efektif dari para direktur secara signifikan mengimbangi dan mengendalikan kecenderungan ini. (Dewi & Oktaviani, 2021) memperkuat temuan ini dengan bukti adanya efek negatif yang signifikan dari direktur independen terhadap penghindaran pajak secara umum, yang mencerminkan kemampuan nyata mereka untuk mengekang praktik penghindaran pajak yang lebih intensif dan terstruktur di perusahaan berskala besar. (Anggraeni & Badjuri, 2025) menyoroti peran moderasi direktur independen dalam hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak, mencatat bahwa kehadiran mereka membantu mengekang kecenderungan perusahaan besar untuk mengeksploitasi skala operasional mereka untuk strategi penghindaran pajak yang berlebihan. (Hanifah, 2022) menawarkan perspektif yang relevan bahwa direktur independen memainkan peran moderasi terkait karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa direktur independen yang kompeten membantu mengekang kemampuan perusahaan besar untuk memaksimalkan skala operasional mereka untuk praktik penghindaran pajak di luar batas yang wajar. Dengan demikian, temuan studi ini secara konsisten menunjukkan bahwa direktur independen memoderasi dan melemahkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan argument secara keseluruhan di atas, hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut

**H5: Komisaris Independen memperlemah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*.**

#### **2.4.6 Peran Komisaris Independen dalam memoderasi pengaruh Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance*.**

Penggunaan utang sebagai alat penghematan pajak merupakan keputusan strategis yang memerlukan pengawasan dan evaluasi oleh badan tata kelola perusahaan, seperti direktur independen. Pertanyaan penelitian yang relevan adalah apakah direktur independen dapat memoderasi hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak. Secara logis, penentuan komposisi pembiayaan merupakan hal strategis yang harus berada di bawah pengawasan ketat dewan komisaris, karena kebijakan yang semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan penghematan pajak melalui eksploitasi pengurangan bunga berpotensi merusak reputasi dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Komisaris independen yang efektif harus mampu membedakan antara kebijakan utang yang didasarkan pada kebutuhan pembiayaan bisnis yang sah dan kebijakan yang hanya mengeksploitasi pengurangan bunga sebagai alat untuk penghindaran pajak yang berlebihan, sehingga penggunaan utang untuk penghindaran pajak dapat dikendalikan secara efektif.

Dalam Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), penentuan struktur modal merupakan salah satu area strategis yang paling rentan terhadap oportunisme dari para manajer sebagai agen, karena komposisi pembiayaan secara langsung memengaruhi beban pajak melalui pengurangan bunga. Manajer yang berfokus pada efisiensi biaya termotivasi untuk meningkatkan proporsi utang tidak hanya untuk mengoptimalkan biaya modal tetapi juga untuk memaksimalkan penghematan pajak guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham sebagai prinsipal. Asimetri informasi yang melekat dalam hubungan keagenan memberi agen keleluasaan untuk merancang struktur modal yang secara strategis mengoptimalkan manfaat pajak dari bunga tanpa transparansi penuh kepada prinsipal atau pemangku kepentingan lainnya. Direktur independen memainkan peran penting sebagai pengawas yang memastikan bahwa keputusan pembiayaan manajemen selaras dengan kepentingan semua pihak, daripada memprioritaskan tujuan jangka pendek agen untuk mengurangi pajak melalui eksploitasi berlebihan atas pengurangan bunga. Dengan demikian, teori ini secara komprehensif menjelaskan bahwa direktur independen dapat melemahkan hubungan positif antara struktur modal dan penghindaran pajak dengan memperkuat kontrol keagenan, yang membatasi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi bauran pembiayaan sebagai alat untuk penghindaran pajak.

Sejumlah studi secara konsisten menunjukkan peran moderasi direktur independen antara struktur modal dan penghindaran pajak. (Anna Mei Rani et

al., 2021) secara eksplisit menemukan bahwa direktur independen memoderasi efek struktur modal terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa pengawasan efektif mereka mengevaluasi dan mengendalikan ketergantungan manajemen yang berlebihan pada pembiayaan utang untuk memaksimalkan penghematan pajak melalui pengurangan bunga. (Rianti et al., 2023) mendukung hal ini dengan bukti bahwa direktur independen memoderasi hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak, karena direktur yang kompeten memverifikasi apakah keputusan pembiayaan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang sehat atau hanya berfungsi sebagai instrumen penghindaran pajak yang menimbulkan risiko terhadap reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. (Rianti et al., 2023) menekankan bahwa meskipun struktur modal yang didominasi utang memiliki efek positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, direktur independen mengendalikan hubungan ini, memastikan bahwa kebijakan pembiayaan manajemen bukan hanya strategi untuk penghindaran pajak yang berlebihan.

(Dewi & Oktaviani, 2021) memberikan konfirmasi empiris tentang pengaruh signifikan direktur independen terhadap penghindaran pajak, yang secara umum menyiratkan kontrol atas strategi utang terstruktur manajemen yang ditandai dengan rasio utang yang tinggi. Dengan demikian, temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan peran moderasi yang signifikan dari direktur independen dalam hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak. Berdasarkan logika, teori yang relevan, dan konsistensi empiris, hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut:

**H6 : Komisaris Independen memperlemah pengaruh Struktur  
Permodalan terhadap *Tax Avoidance***